

PENGARUH KOORDINASI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

Fitri Dwi Haryani
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol Untan
Email: www.vthre3_7an9e15@yahoo.co.id

Abstrak: Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Koordinasi terhadap Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap implementasi program keluarga berencana di kecamatan simpang hilir kabupaten kayong utara. Penelitian termasuk dalam penelitian eksplanasi dengan analisis kuantitatif dan menggunakan teori Djamin tentang koordinasi dan teori Van Meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh instansi pelaksana program Keluarga Berencana memberikan kontribusi yang baik sebesar 0,316 terhadap implementasi program keluarga berencana sehingga koordinasi perlu ditingkatkan untuk membantu implementasi program keluarga berencana lebih efektif lagi. Selain itu koordinasi memiliki koefisien regresi sebesar 0,972 terhadap implementasi program keluarga berencana.

Kata Kunci: Koordinasi, Implementasi Program dan Pengaruh

Abstrac : title of this study is “influence the coordination of the implementation of family planning in the subdistrict Simpang Hilir Kayong Utara districts”. This research aims to identify and analyze the influence the coordination of the implementation of family planning in the subdistrict Simpang Hilir Kayong Utara districts. This researchis included in the explanatory research with quantitative analysis and using the theory by Djamin of coordination and theory by Van Meter and Van horn of the implementation of public policy. The results of the field study showed that coordination is carried out by the implementing agency for family planning programs give a good contribution of 0,316 the implementation of the family planning program so that coordination should be improve to help implementation of family planning programs more effectively. In addition, coordination has a regression coefficient of 0,972 the implementation of the family planning program.

KeyWords : coordination, implementation of the program and the influence

1. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan adalah kebijakan public yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut menyangkut tiga hal yaitu adanya tujuan, adanya kegiatan untuk mencapai tujuan dan adanya hasil kegiatan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139), tentang definisi implementasi kebijakan publik yaitu tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Begitu pula dengan kebijakan keluarga berencana, dengan dikeluarkannya kebijakan keluarga berencana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka daerah sebagai jenjang pemerintahan paling bawah memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan program keluarga berencana melalui petugas KB yang ada di daerah. Program Keluarga Berencana yang melibatkan masyarakat sebagai objek dari program ini partisipasinya dalam mengikut sertakan diri sebagai peserta keluarga berencana merupakan salah satu berperan dalam menanggulangi permasalahan kependudukan yang dapat berdampak pada perekonomian baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Menurut Carter et al (dalam Wayne Parsons, 2011: 477), bahwa sistem implementasi yang sukses melibatkan empat tipe kontrol yaitu : 1) Koordinasi sepanjang waktu, 2) Koordinasi pada waktu tertentu, 3) Detail logistik dan penjadwalan dan 4) Penjagaan dan pemeliharaan batasan struktural. Begitu pula dalam implementasi program keluarga berencana, dimana di Kecamatan Simpang Hilir diduga terdapat factor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam implementasi kebijakan program keluarga berencana. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada factor koordinasi eksternal dimana dilihat indikasi terjadi permasalahan pada tingkat implementor diduga terdapat banyak PLKB ataupun pelaksana program lapangan yang tidak ikut serta dalam pelatihan dan pembinaan dalam melaksanakan program

disebabkan PLKB memiliki profesi lain selain menjadi PLKB. Hal ini akibat dari PLKB berstatus tenaga kontrak sehingga membuat PLKB tidak fokus pada tugas dan tanggungjawab sebagai PLKB saja akibatnya informasi yang akan disampaikan pada kader-kader penyuluh maupun kepada Bidan Pustu di desa-desa menjadi terputus. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis “Pengaruh koordinasi terhadap implementasi program Keluarga Berencana di Kecamatan Simpang Hilir kabupaten Kayong Utara”.

Menurut Djamin (dalam Soekarno, 1985: 47), tentang koordinasi adalah Usaha kerja sama antara badan/instansi/ unit dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling pengertian, saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Integrasi adalah suatu usaha menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan unit / instansi tersebut, sehingga merupakan suatu kebutuhan pemikiran yang ditentukan dan dipahami bersama. Teori Djamin tersebut merupakan dasar dari menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan implementasi kebijakan public menggunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139), tentang definisi implementasi kebijakan publik yaitu tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dilihat dari pengertian yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn maka untuk menganalisis implementasi program keluarga berencana dalam penelitian menggunakan tujuan-tujuan program KB sebagai indikator-indikator penelitian sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Menurut pendapat Carter et al (dalam Wayne Parsons, 2011: 477), bahwa sistem implementasi yang sukses melibatkan empat tipe kontrol yaitu : 1) Koordinasi sepanjang waktu, 2) Koordinasi pada waktu tertentu , 3) Detail logistik dan penjadwalan dan 4) Penjagaan dan pemeliharaan batasan struktural.

Pendekatan system menekankan pada pencapaian level kerja sama yang baik dalam hubungan manusia dengan memfokuskan pada arti penting dari *team work* bagi keberhasilan implementasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan ilmu Administrasi Negara, khususnya berkaitan dengan kebijakan publik. Serta manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran serta informasi kepada pemerintah terkait dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana dan Penyuluh KB (PLKB) Kecamatan Simpang Hilir serta Bidan desa sebagai tenaga ahli dalam rangka memecahkan masalah kependudukan ini khususnya dari segi Program Keluarga Berencana (KB).

2. METODE

A. Kajian Teori

Menurut Djamin (dalam Soekarno, 1985: 47), tentang koordinasi adalah Usaha kerja sama antara badan/instansi/ unit dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling pengertian, saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Integrasi adalah suatu usaha menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan unit / instansi tersebut, sehingga merupakan suatu kebutuhan pemikiran yang ditentukan dan dipahami bersama. Koordinasi penting dalam tahapan implementasi kebijakan dengan beberapa alasan yaitu :

1. Koordinasi penting dilakukan agar ada kejelasan arah , tujuan dan tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan implementasi sebuah kebijakan public. Keadaan ini penting karena mempengaruhi efektivitas dan harmonisasi gerak langkah dari para pelaksana kebijakan.
2. Koordinasi akan menumbuhkan kesatuan tindakan dan metode

karena tanpa koordinasi para agen pelaksana kebijakan akan berjalan sendiri-sendiri menurut versi mereka masing-masing.

3. Koordinasi memungkinkan *sharing of informasi* dari para pelaksana. Ini artinya suatu kejelasan yang penting tentang berbagai hal perlu dibahas bersama untuk mencari alternative yang akan ditempuh untuk mengsucceskan suatu kegiatan.
4. Koordinasi akan memungkinkan partisipasi dan keterlibatan intensif dari berbagai elemen dan public oleh karena hal itu menyediakan waktu dan kesempatan bagi terbukanya keterlibatan umum. Dukungan dan keterlibatan umum yang luas akan sangat mempengaruhi tingkat kesulitan implementasi kebijakan.
5. Koordinasi sangat memungkinkan pembagian pekerjaan yang jelas antar pelaksana kebijakan baik pada tingkat manajemen pusat maupun daerah, dengan koordinasi siapa yang mengerjakan apa, kepada siapa mesti bertanggungjawabkannya akan dapat dikelola dengan baik (Badjuri dan Yuwono, 2003:120-121).

Adapun jenis-jenis koordinasi menurut Penjelasan Peraturan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah , Pasal 1 :

1. Koordinasi fungsional antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat.
2. Koordinasi instansional terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan.
3. Koordinasi teritorial terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu (Moekijat. 1994:33-34).

Berdasarkan para pakar di atas, dapat dikatakan bahwa koordinasi memiliki tujuan agar organisasi dapat mencapai sasaran dengan seefektif dan seefisien mungkin. Disadari bahwa untuk mencapai tujuan suatu program maka organisasi terkait merupakan suatu sistem dimana saling berhubungan satu dengan lainnya

Implementasi kebijakan public menggunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139), tentang definisi implementasi kebijakan

publik yaitu tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Program KB merupakan program yang berdasarkan kebijakan pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Tujuan dari kebijakan keluarga berencana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Mengatur kehamilan yang diinginkan
2. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak
3. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
4. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana
5. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Menurut pendapat Carter et al (dalam Wayne Parsons, 2011: 477), bahwa sistem implementasi yang sukses melibatkan empat tipe kontrol yaitu : 1) Koordinasi sepanjang waktu, 2) Koordinasi pada waktu tertentu , 3) Detail logistik dan penjadwalan dan 4) Penjagaan dan pemeliharaan batasan struktural. Pendekatan system menekankan pada pencapaian level kerja sama yang baik dalam hubungan manusia dengan memfokuskan pada arti penting dari *team work* bagi keberhasilan implementasi. Menurut Van Meter dan Van Horn ada enam variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi (koordinasi) dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Agustino, 2006:142).

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanasi, yaitu penelitian dengan pertimbangan peneliti mengkaji dan menjelaskan hubungan antar variabel bebas

terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan jenis penelitian eksplanasi maka peneliti ingin mengkaji dan menjelaskan tentang hubungan koordinasi terhadap implementasi program keluarga berencana yang ada di kecamatan simpang hilir kabupaten kayong utara, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Populasi penelitian ini meliputi semua pegawai yang ada pada Bidang Keluarga Berencana di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana yaitu 5 orang, penyuluh KB (PLKB) di Kecamatan Simpang Hilir yaitu 5 Orang dan bidan di Puskesmas Kecamatan Simpang Hilir yaitu 12 bidan di puskesmas dan pustu. Jadi jumlah populasi dari penelitian ini adalah 22 orang. Dalam hal ini untuk menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan tehnik sampling jenuh. Menurut Sugiono (2010: 85), Tehnik sampling jenuh adalah tehnik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kurang dari 30 orang Oleh karena itu, jumlah sampel yang diambil peneliti yaitu 22 orang. Instrumen yang digunakan untuk penelitian yaitu melalui menyusun pertanyaan dari indikator variabel-variabel penelitian yang biasa disebut kuesioner dimana dalam penelitian ini menggunakan 38 pernyataan. Dari 38 pernyataan terdapat 14 pernyataan untuk variabel koordinasi dan 24 pernyataan untuk variabel implementasi program KB. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan melalui tanya jawab dengan sumber data (responden) dengan secara tidak langsung dengan menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian.

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu dalam penelitian kuantitatif data diperoleh dari sampel melalui penyebaran angket/kuesioner. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan data, maka peneliti menggunakan uji validitas dengan mengkorelasikan antara skor item instrument dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total dan uji reliabilitas dengan tehnik *alfa*

cronbach dimana keduanya menggunakan SPSS 18.0 for window. Menurut Sugiono (2010:126), Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur sedangkan reliabilitas adalah dimana data yang diperoleh konsisten.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil frekuensi deskripsi responden, responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 responden yang merupakan implementor yang melaksanakan program KB. berdasarkan frekuensi jenis kelamin dapat dilihat bahwa mendominasi dalam menangani program KB adalah Perempuan yang berjumlah 17 orang atau sekitar 77% responden sedangkan jumlah pegawai laki-laki hanya 5 orang atau sekitar 23 % responden. Jika dilihat dari hasil frekuensi umur, jumlah pegawai yang menangani program KB didominasi responden yang berumur 21-30 tahun yaitu berjumlah 14 orang atau sekitar 63 % responden dan yang paling sedikit adalah pegawai yang berumur lebih dari 50 tahun dengan jumlah 1 responden atau sekitar 4 % responden. Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai yang dominan menangani program KB adalah tingkat pendidikan DIPLOMA yaitu sebanyak 15 orang atau sekitar 68% responden dan yang paling sedikit menangani program KB adalah tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 1 orang atau sekitar 5% responden. Pegawai pada tingkat pendidikan SMA adalah sebanyak 6 orang atau sekitar 27% responden. Apabila dilihat dari masa kerja dari responden, pegawai yang dominan menangani program KB adalah tingkat pendidikan DIPLOMA yaitu sebanyak 15 orang atau sekitar 68% responden dan yang paling sedikit menangani program KB adalah tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 1 orang atau sekitar 5% responden. Pegawai pada tingkat pendidikan SMA adalah sebanyak 6 orang atau sekitar 27% responden.

Dari hasil frekuensi deskripsi variabel, variabel koordinasi yang dilaksanakan aparat pemerintah sebagai pelaksana program Keluarga Berencana di kecamatan Simpang Hilir kabupaten Kayong Utara sebagian besar termasuk ke dalam kualifikasi baik dengan persentase kualifikasi baik sebesar 68,18%, hanya sebagian kecil yang masuk ke dalam kualifikasi kurang baik dengan persentase 18,18%. Jika dilihat dari indikator variabel koordinasi dimana terdiri dari indikator integrasi yaitu penyatupaduan tindakan berbagai unit kerja atau aparat pemerintah dari berbagai instansi sehingga suatu kebutuhan pemahaman pencapaian tujuan bersama diperlukan termasuk dalam kualifikasi baik 59,09% dan indikator kerjasama yaitu pemahaman komunikasi antara implementor guna mencapai tujuan termasuk dalam kualifikasi baik 59,09%. Pada variabel implementasi program KB implementasi program KB yang dilaksanakan aparat pemerintah sebagai pelaksana program Keluarga Berencana di kecamatan Simpang Hilir kabupaten Kayong Utara sebagian besar termasuk ke dalam kualifikasi baik dengan persentase 77,27%. jika dilihat berdasarkan indikatornya yaitu Mengatur kehamilan yang diinginkan termasuk dalam kualifikasi baik sebesar 68,18%, Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak termasuk kualifikasi baik dengan persentase 68,18%, Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan persentase sebesar 59,1% termasuk dalam kualifikasi baik, Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana dengan persentase sebesar 59,1% termasuk dalam kualifikasi baik dan Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan termasuk dalam kualifikasi kurang baik dengan persentase sebesar 54,56%.

Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan. Analisis regresi linier yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel koordinasi terhadap variabel

implementasi program. Berdasarkan hasil perhitungan statistic computer, diperoleh nilai korelasi antara variabel koordinasi terhadap variabel implementasi program KB sebagai berikut :

Tabel 3.1 Hasil Uji Korelasi Product moment

		Analysis of Variance			
R	.562		Df	Sum of Squares	Mean Square
R. Square	.316	Regression	1	362.218	362.118
Adjusted R Square	.282	Residual	20	782.472	39.124
Std. Error of the Estimate	6.255	Total	21	1144.591	
F= 9.256		Sig F = .006			

Sumber : Hasil perhitungan SPSS 18.0.

Keterangan :

R : Koefisien Korelasi

R² : Koefisien Determinasi

Tabel 3.2 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Variabel	B	SE-B	Beta	T	Sig.T
Koordinasi X	.972	.319	.562	3.042	.006
(constanta)	32.639	11.002		2.967	.008

Sumber : Hasil perhitungan SPSS 18.0.

Keterangan :

B : Koefisien Regersi

T : Hasil Peritungan Nilai T

Hasil analisis tabel 3.1 di atas diketahui bahwa besarnya koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,562 dan R Square sebesar

0,316 dengan nilai F regresi linier sebesar 9.256 pada taraf signifikan F kurang dari 0.05 (sig. F = 0.006). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara variabel koordinasi terhadap variabel implementasi program KB adalah sebesar 0,562. Ini berarti bahwa hubungan antara variabel koordinasi terhadap variabel implementasi program KB cukup kuat. Semakin meningkatnya koordinasi maka semakin meningkat pula implementasi program KB tersebut.

Dari tabel 3.2 diatas didapatlah hasil dari uji regresi linier sederhana diperolehlah persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = 32.639 + 0,972 X ,$$

Besarnya koefisien regresi setiap variabel bebas X sebelum dibakukan ditunjukkan oleh besar nilai B. Setiap perkiraan nilai B, memiliki kesalahan baku yang bervariasi seperti yang ditunjukkan pada SE-B. Nilai Konstanta (A) atau besarnya nilai variabel terikat Y adalah sebesar 32.639. Nilai Konstanta (A) tersebut menunjukkan besarnya harga variabel terikat Y, dengan asumsi semua variabel bebas (X) sama dengan nol (X = 0). Mengetahui kuat atau lemahnya pengaruh variabel bebas, perlu diungkapkan hasil uji signifikan T (Kolom 5 dan 6). Hasil uji signifikan T, dapat ditegaskan bahwa variabel koordinasi (X) menunjukkan T_{hitung} dengan derajat kepercayaan yaitu sebesar 3.042 (sig. T = 0,006). Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,006 < 0,05 , maka H_a diterima dan H₀ ditolak sedangkan T_{tabel} pada taraf signifikan 5 % dengan dk = n - 1 = 22 - 1 = 21 adalah 2,080. Dikarenakan T_{hitung} > T_{tabel} (3.042 > 2,080) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai T positif menunjukkan bahwa variabel X mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan koordinasi memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi program KB.

B. Pembahasan

Besarnya koefisien determinasi (R Square) koordinasi terhadap implementasi program KB yaitu 0,316. Hal ini diinterpretasikan bahwa pengaruh koordinasi terhadap implementasi program KB sebesar

31,6 % dan sisanya sebesar 68,4 % disebabkan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian yang diperhitungkan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan (disposisi) para pelaksana dan lingkungan ekonomi sosial dan politik.

Selanjutnya, dalam menentukan kriteria apakah menerima atau menolak hipotesis 0 (H_0) adalah berdasarkan uji F yang diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 9.256 dengan nilai probabilitas (sig) = 0,006. Untuk membuktikan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen maka F_{hitung} dibandingkan F_{tabel} , jika ($F_{hitung} \geq F_{tabel}$) berarti koordinasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi program KB. Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka diperoleh nilai F_{hitung} (9.256) dan nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,006 < 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Nilai F_{tabel} dengan dk penyebut = $N - k - 1 = 20$ dan dk pembilang = 1 diperoleh F_{tabel} 4,35 maka F_{hitung} (9.256) $\geq F_{tabel}$ (4,35), berarti koordinasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi program KB. Berikut mengenai persamaan garis regresi linier sederhana antara koordinasi terhadap implementasi program KB dapat disusun dengan berpedoman pada hasil analisis koefisien regresi (B) dari variabel bebas dan konstanta (A). Hasil uji signifikan T, dapat ditegaskan bahwa variabel koordinasi (X) menunjukkan T_{hitung} dengan derajat kepercayaan yaitu sebesar 3.042 (sig. T = 0,006). Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,006 < 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak sedangkan T_{tabel} pada taraf signifikan 5 % dengan dk = $n - 1 = 22 - 1 = 21$ adalah 2,080. Dikarenakan $T_{hitung} \geq T_{tabel}$ (3.042 $\geq$ 2,080) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki kontribusi terhadap Y.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh koordinasi terhadap implementasi program KB di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Hipotesis terbukti karena telah di dapat koefisien korelasi yang termasuk dalam kategori sedang antara variabel koordinasi terhadap implementasi program KB yaitu sebesar 0,562, sedangkan besar pengaruh variabel koordinasi sebesar (31,6 %) terhadap variabel implementasi

program dan terdapat (68,4 %) dipengaruhi oleh faktor lain yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan (disposisi) para pelaksana dan lingkungan ekonomi sosial dan politik. Dengan nilai kedua variabel yang positif yakni kenaikan variabel yang satu diikuti kenaikan variabel lainnya atau sebaliknya. Jadi, apabila koordinasi baik (positif), maka implementasi program KB juga baik (positif), jika koordinasi buruk (negative) maka implementasi program KB juga buruk (negative).

4. SIMPULAN DAN KETERBATASAN

A. Simpulan dan saran

1. Simpulan

Variabel koordinasi sebagai variabel bebas, yang mempengaruhi implementasi program KB di kecamatan Simpang Hilir Kab. Kayong Utara dikategorikan baik. Artinya, berbagai pihak telah saling bekerjasama dan saling mendukung dengan baik demi kelancaran implementasi program KB tersebut. Kemudian Variabel implementasi program KB di kecamatan Simpang Hilir Kab. Kayong Utara yang merupakan variabel terikat dikategorikan baik. Artinya, yaitu implementasi program KB terlaksana dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya atau frekuensi tanggapan reponden yang menyatakan setuju dari indikator-indikator implementasi program. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana yang telah dilakukan pada penelitian ini Hasil analisis diperoleh bahwa variabel koordinasi memiliki koefisien regresi sebesar 0,972 (bertanda positif) terhadap implementasi program KB dan nilai T_{hitung} 3.042 dengan tingkat signifikansi 0,006. Hal ini berarti bahwa koordinasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi program KB. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa koordinasi berpengaruh terhadap implementasi program KB di kecamatan Simpang Hilir kabupaten Kayong Utara dapat diterima dan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat dilihat dari R Square yaitu sebesar 0,316 yang

artinya koordinasi memiliki kontribusi terhadap implementasi program KB sebesar 31,6 % dan 68,4 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.

2. Saran

- a. Sebaiknya penyuluhan yang lebih komunikatif dan informative mengenai pentingnya program KB dilakukan lebih sering dan jelas terhadap masyarakat karena menyangkut kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
- b. meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam masyarakat tersebut yang bisa membantu dan meningkatkan kesuksesan dalam pelaksanaan program KB tersebut.
- c. meningkatkan kontrol pengawasan baik dari instansi di kabupaten terhadap pelaksana / implementor ketika pelaksanaan program dilapangan di kecamatan maupun di desa.
- d. Menambah sarana dan prasarana dalam menunjang implementasi program KB tersebut seperti alat peraga KB, klinik KB di desa-desa dan media sosialisasi seperti spanduk serta penunjang lainnya yang dapat menambah kemudahan dalam penyuluhan pelaksanaan program KB.
- e. Perlu melakukan penyuluhan intens terhadap pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) karena selain ASI penting bagi pertumbuhan anak, pemberian ASI.

B. Keterbatasan Studi

Penelitian ini hanya menfokuskan pada faktor koordinasi sedangkan variabel X hanya dapat mempengaruhi variabel Y sebesar 31,6 % dan sisanya 68,4 % dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel

X dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan segi studi pustaka yang mana dalam hal ini, sedikit sulit mencari referensi mengenai permasalahan yang diambil, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam mencari dan mengumpulkan literature.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana, Penyuluh KB dan Puskesmas Simpang Hilir khususnya kepada bidan-bidang di Simpang Hilir kabupaten Kayong Utara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis selama penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badjuri, H. Abdulkar dan Yuwono, Teguh. 2003. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang :Unpad.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung: Mandar Maju.
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta..
- Soekarno, K. 1985. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Miswar.
- Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : FITRI DWI HARYANI

NIM / Periode Lulus : E42008071 / 2012

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address/HP : vthreeplace@gmail.com / 089693490681

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGARUH KOORDINASI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA
BERENCANA DI KECAMATAN SIMPANG HILIR
KABUPATEN KAYONG UTARA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ Fulltext

☐ Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal..... 10/1/2013

Drs. H. Agus Eka, M.S.
NIP. 19620123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 9 Januari 2013

(FITRI DWI HARYANI)